



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 30/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM REVIEW/ASISTENSI RANCANGAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025  
DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diverifikasi;
- b. bahwa untuk kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA-SKPD) dengan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan dokumen perencanaan lainnya serta sinkronisasi Program dan Kegiatan antar Perangkat Daerah, perlu dilakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut sebelum dijadikan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Review/Asistensi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : ...



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Review/Asistensi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas mempersiapkan seluruh materi pendukung serta menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Khusus anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang merupakan staf pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, penugasannya ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Tugas pimpinan perangkat daerah terkait masing-masing.

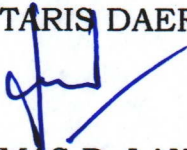
KEENAM : ...



- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 JANUARI 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
  3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  7. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  8. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  9. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  10. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	Re
Plt. Kepala Biro Hukum	ku
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	x



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUEBRNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 30 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 17 JANUARI 2025

TENTANG TIM REVIEW/ASISTENSI RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REVIEW/ASISTENSI RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan pembinaan dan arahan dalam melakukan penelahaan RKA SKPD.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTT	Penanggungjawab pada Bidang Pemerintahan dan Kesra	<p>a. memberikan arahan dalam melakukan penelahaan RKA SKPD dalam penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD pada Bidang Pemerintahan Setda;</p> <p>b. mengoordinasi, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penelahaan RKA SKPD pada Bidang Pemerintahan Setda; dan</p> <p>c. mengoordinasi, menghimpun, memberi petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi RKA SKPD pada Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda.</p>
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT	Penanggungjawab pada Bidang Perekonomian dan Pembangunan	<p>a. memberikan arahan dalam melakukan penelahaan RKA SKPD dalam penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD pada Bidang Perekonomian dan Pembangunan;</p> <p>b. mengoordinasi, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penelahaan RKA SKPD Daerah pada Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</p> <p>c. mengoordinasi, menghimpun, memberi petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi RKA SKPD Daerah pada Bidang Perekonomian dan Pembangunan.</p>



4.	Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT	Penanggungjawab pada Bidang Administrasi Umum	<p>a. memberikan arahan dalam melakukan penelaahan RKA SKPD dalam penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD pada Bidang Administrasi Umum;</p> <p>b. mengoordinasi, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penelaahan RKA SKPD pada Bidang Administrasi Umum; dan</p> <p>c. mengoordinasi, menghimpun, memberi petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi RKA SKPD pada Bidang Administrasi Umum.</p>
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Ketua I	<p>a. membantu pelaksanaan tugas Penanggung Jawab di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan</p> <p>b. mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan pekerjaan dalam rangka penelaahan RKA SKPD meliputi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dalam rangka penyusunan Rancangan. APBD dan Perubahan APBD.</p>
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua II	<p>a. membantu pelaksanaan tugas Penanggung Jawab di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan</p> <p>b. mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan pekerjaan dalam rangka penelaahan RKA SKPD.</p>
7.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua III	<p>a. membantu pelaksanaan tugas Penanggung Jawab di bidang pengelolaan pendapatan dan aset daerah; dan</p> <p>b. mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan pekerjaan dalam rangka penelaahan RKA SKPD.</p>
8.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua IV	<p>a. membantu pelaksanaan tugas Penanggung Jawab di bidang pelayanan publik, kelembagaan, analisis jabatan dan tata laksana kinerja; dan</p> <p>b. mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan pekerjaan dalam rangka penelaahan RKA SKPD.</p>
9.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Ketua V	<p>a. membantu pelaksanaan tugas Penanggung Jawab di bidang pengadaan barang dan jasa; dan</p> <p>b. mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan pekerjaan dalam rangka penelaahan RKA SKPD.</p>



10.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. menyusun langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penelaahan RKA SKPD;</p> <p>b. membantu Ketua II dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD dalam bidang penganggaran keuangan daerah; dan</p> <p>c. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan RKA SKPD</p>
11.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua I dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD dalam bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan RKA SKPD</p>
12.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua I dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan RKA SKPD</p>
13.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua I dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD dalam bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan RKA SKPD.</p>
14.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua I dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD dalam bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan RKA SKPD.</p>
15.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT		<p>a. membantu Ketua I dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD dalam bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan RKA SKPD.</p>
16.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua I dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD dalam bidang riset dan inovasi; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan RKA SKPD.</p>



17.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua II dalam menkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD dalam bidang pengelolaan keuangan daerah; dan</p> <p>c. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan RKA SKPD.</p>
18.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua II dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan sinkronisasi usulan RKA SKPD dengan program kegiatan kabupaten/kota; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan RKA SKPD.</p>
19.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua II dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD dengan program penatausahaan dan pengelolaan keuangan; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan RKA SKPD.</p>
20.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua II dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD dengan program penatausahaan dan evaluasi pertanggungjawaban; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan RKA SKPD.</p>
21.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua III dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD di bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.</p>
22.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua III dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD di bidang pendapatan pajak daerah; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.</p>



23.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua III dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD di bidang pendapatan retribusi daerah serta pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.</p>
24.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua III dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD di bidang analisa kebutuhan dan penatausahaan aset;</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD</p>
25.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua III dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD di bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset; dan</p> <p>melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD</p>
26.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua IV dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD di bidang kelembagaan dan analisis jabatan; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.</p>
27.	Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua IV dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD di bidang kelembagaan dan analisis jabatan; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.</p>
28.	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua IV dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD di bidang kelembagaan dan analisis jabatan; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.</p>
29.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua V dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD di bidang pengadaan barang dan jasa; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.</p>



30.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua V dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.</p>
31.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua V dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas penelaahan RKA SKPD di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.</p>
32.	Solaiman Mario, SE, MM/Analisis Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menelaah RKA SKPD di bidang data dan informasi; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.</p>
33.	Frits Isak Lake, S.Sos/ Analisis Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menelaah RKA SKPD di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.</p>
34.	Maria Enggelina Iku Sakasare, S.STP, MA/ Analisis Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menelaah RKA SKPD di bidang pemerintahan dan politik; dan</p> <p>c. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.</p>
35.	Bonavantura Taco, S.Pd/ Analisis Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menelaah RKA SKPD di bidang pembangunan manusia; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.</p>



36.	Theresia M. Sri Sarinah Lendes, SE/ Analis Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang kesejahteraan sosial dan budaya; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD
37.	Yoseph Hironimus Dahat, S.IP, M.Ec.Dev/ Analis Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang perekonomian; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD
38.	Gde Henry A. Putrayasa, ST/ Analis Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang sumber daya alam; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD
39.	Bernadus Gapi, SE/ Analis Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang pariwisata; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD SDA
40.	Tanda Soalagogo Sirait, ST, MURP/ Analis Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang infrastruktur; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD



41.	Caroline Mayadewi Chaniago Wairo, ST, M. Si/ Analis Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang kewilayahan; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD
42.	Gabriel Adu, S. Si/ Analis Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang tata ruang dan lingkungan; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD
43.	Melianus Mesakh Taebenu, S. STP, M. PP/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang Sosial dan Pemerintahan; dan c. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD
44.	Herson Yusuf, SP/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di Ekonomi dan Pembangunan; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
45.	Charles C. Rambung, MIPH, MHM, Apt/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang Inovasi dan Teknologi; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
46.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang keuangan SKPD; dan a. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.



47.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang kepegawaian dan umum SKPD; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
48.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang penyusunan anggaran bidang pemerintahan; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
49.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang penyusunan anggaran bidang perekonomian dan pembangunan; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
50.	Kepala Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum; dan a. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
51.	Kepala Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang perekonomian dan pembangunan; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
52.	Helena W. Yacoba Lema, SE/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang pengelolaan kas dan pembinaan bendahara; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
53.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang Dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.



54.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang Dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
55.	Kepala Sub Bidang Pembinaan Dan Evaluasi Wilayah I pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD dan melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran APBD Wilayah Flores; dan a. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
56.	Kepala Sub Bidang Pembinaan Dan Evaluasi Wilayah II pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD dan melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran APBD Wilayah Sumba, Lembata, Alor dan Sabu Raijua; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
57.	Dra. Yenny C.M. Izaac, M.Si/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD dan melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran APBD Wilayah Timor dan Rote Ndao; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
58.	Remmy Ch. Pah, S.STP, M.Si/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang Program data, dan evaluasi SKPD; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
59.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang keuangan SKPD; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
60.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang kepegawaian dan umum SKPD; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
61.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang pendataan dan penetapan; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.



62.	Adriana Yuliana Mbeo, SE/ Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang layanan dan keberatan; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
63.	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang pembukuan dan penagihan; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
64.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang pendataan dan penerimaan I; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
65.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang pendataan dan penerimaan II; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
66.	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang analisa kebutuhan dan pengadaan; dan a. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
67.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang penatausahaan aset; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
68.	Jacobus Makin, ST, M.Ec.Dev./ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang penetapan status dan penilaian aset; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
69.	Natalia Th. F. Saba, S.Sos, MM/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang pemanfaatan aset; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.



70.	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang pemindahtanganan dan penghapusan aset; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD
71.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang pengamanan dan penyelesaian sengketa; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD
72.	Eugene Cornelis, SE/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang Program data, dan evaluasi SKPD; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
73.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang keuangan SKPD; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
74.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang kepegawaian dan umum SKPD; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
75.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang tata usaha SKPD; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
76.	Ardi Arizon Koreh, SE M. Si/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang Kelembagaan; dan c. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
77.	Marsella Alpiony M. Gillik, SE, MM/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang analisis jabatan; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
78.	Benyamin I.A. Balukh, S.Kom/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Prov. NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang tatalaksana; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.



79.	Kunibertus Ganti Gai, S.Fil, M.Si/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang Reformasi Birokrasi; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
80.	Lucius W. Luly, S.STP, MA/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
81.	Mardiosy E. Rihi Ratu, SH/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan c. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
82.	Dominika Odelberta G. Pawe, SE, MM/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan a. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
83.	Demy .Ku, SH/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
84.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang pengembangan sistem informasi; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
85.	Yanes G. Panie, SSTP, M.Pub.Pol/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
86.	Kepala Sub Bagian Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang Pembinaan SDM pengadaan barang dan jasa; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.



87.	Sofi J. Messakh, SE/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menelaah RKA SKPD di bidang Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
88.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota (Koordinator I)	Melakukan penelaahan RKA SKPD Bidang Pemerintahan.
89.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota (Koordinator II)	Melakukan penelaahan RKA-SKPD Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
90.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota (Koordinator III)	Melakukan penelaahan RKA-SKPD Bidang Administrasi Umum.
91.	Staf pada Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I dalam melakukan penelaahan RKA-SKPD sesuai bidang tugas.
92.	Staf pada Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II dalam melakukan penelaahan RKA SKPD sesuai bidang tugas.
93.	Staf pada Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator III dalam melakukan penelaahan RKA SKPD sesuai bidang tugas.
94.	Staf pada Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.



95.	Staf pada Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
96.	Staf pada Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di Bidang Pendataan dan Penetapan Aset; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
97.	Staf pada Bidang Pembukuan dan Penagihan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di Bidang Pembukuan dan Penagihan; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
98.	Staf pada Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
99.	Staf pada Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Penatausahaan Aset; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
100.	Staf pada Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
101.	Staf pada Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
102.	Staf pada Bagian Keuangan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di Bagian Keuangan; dan c. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD



103.	Staf pada Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di Bagian Kepegawaian dan Umum; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD
104.	Staf pada Bidang Pendataan dan Penerimaan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Pendataan dan Penerimaan I; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD
105.	Staf pada Bidang Pendataan dan Penerimaan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Pendataan dan Penerimaan II; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD
106.	Staf pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
107.	Staf pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
108.	Staf pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD
109.	Staf pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD
110.	Staf pada Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Penelitian dan Pengembangan; dan b. membantu Membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD





111.	Staf pada Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Keuangan; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD
112.	Staf pada Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Kepegawaian dan Umum; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD
113.	Staf pada Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
114.	Staf pada Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Tatalaksana dan Pelayanan Publik; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
115.	Staf pada Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Kinerja Organisasi; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
116.	Staf pada Bidang Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Tata Usaha Biro; dan c. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
117.	Staf pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Pengadaan Barang dan Jasa; dan d. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
118.	Staf pada Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan e. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.



119.	Staf pada Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
120.	Staf pada Bidang Pengembangan Sistem Informasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Pengembangan Sistem Informasi; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.
121.	Staf pada Bagian Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menelaah RKA SKPD di bidang Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa; dan b. membantu melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA SKPD.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	